

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifuddin, M, *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam*. Elex Media Komputindo, 2020.
- Azmi Fendri, *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara*, PTRaja grafindo, , Jakarta, 2020.
- Bachtiar Arifudin Husain, & Arief Budi Santoso, *Analisis Kepatuhan Karyawan Terhadap Pemberlakuan Prosedur Operasional Standar (SOP) pada Perusahaan Baru*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta 2022
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Dwi Haryati, *Hukum administrasi Negara*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2024
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Tim Qiara Media, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021
- philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsipprinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Prajudi atmosudirjo, *hukum administrasi negara*, jakarta, ghalia indonesia, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, ,2018
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Media Kita, Surabaya, 2008.
- soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi ; EDISI*, Ed. Revisi ; Cet. 48 ; Penerbitan, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 201
- Wira, *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, Jakarta, 2015.

Jurnal.

- Andri Surya Kurniawan, “Penggunaan Kekuatan Brimob dalam Pengamanan Unjuk Rasa berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009”. *Jurnal Impresi Indonesia* Vol.1 No.12 (2022): 1342-1349, <https://doi.org/10.58344/jii.v1i12.1759>
- Ardian, Dwi Atmoko, Lukman Hakim, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi yang melakukan Pelanggaran dalam Pengaman Unjuk Rasa Ditiinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kapolri”,

Selisik Jurnal, Vol. 9 No. 1, (2023):37-65,
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/5218/2427>

Aulianisa, Sarah Safira, and Athira Hana Aprilia. "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat." *Padjadjaran Law Review* Vol.7 No. 2 (2019): 26-37. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>

Dita Rizqita Sari, Abdul Rohim, Suta Ramadan, "Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol. 2 No.1 (2024): 54-70, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.889>

Eko Nuriyatman, Arrie Budhiartie, Latifah Amir, "Peran Hukum dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lahan Gambut" *Jurnal USM Law Review* Vol 8 No 2 (2025):753-776. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11857>

Elvando Wahani, "Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Melindungi Tahanan" *Jurnal Lex Crimen* Vol. 3 No. 1 (2014):89-98, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/3842/3360/7261>

Fandy Lucky Septiyandi, Fikrotul Jadidah, "Tanggungjawab Hukum Pelaku Demonstrasi yang Anarkis dan Menimbulkan Kerusakan." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 3 (2022):6527-6532, <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4161>

Faredo Yudasena , Prima Angkupi, Intan Pelangi. "Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi." *JUSTICE: Jurnal Hukum* Vol 1, No 1 (2021):38-52 <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/>

Fifi Qurania, Ma'ruf Hafidz, Sutiawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Massa Aksa Sebagai Korban Tindakan Represif Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1 (2020):1-40, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/325>

Hanna Theresia Febiola Toha, Cornelis Djelfie Massie, "Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis". *Jurnal Lex Privatum* Vol.13 No.2 (2024):32-44 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53921>

Henny Aprianty, George Rudiyanto, Dkk, "Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi" *PUBLISITAS Jurnal of social sciences and politics* Vol. 9 No.2 (2023):133-143, DOI: 10.37858/publisitas.v9i2.321

I Made Santika, "Pemberdayaan Personel Dalmas Direktorat Sabhara Polda Bali dalam Peningkatan Kemampuan Pengamanan Unjuk Rasa". *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol.11 No.3 (2017):16-29,

<https://doi.org/10.35879/jik.v11i3.6>

- I Putu Ary Yoga Pramana Putra, Oskar S. Matompo, Ida Lestawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Kepolisian (Studi Di Kepolisian Resor Palu)." *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 2 No. 1 (2019):1888-1902, <https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.716>
- M. Ryan Sahbana, "Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol.1 No.2 (2013):1-9, <https://media.neliti.com/media/publications/150347-ID-none.pdf>
- Maisa, Moh. Didi Permana, Abd. Wahid Milsan L, "Peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Objek Vital Nasional Kabupaten Morowali Utara." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.7 No. 6 (2024): 2161-2172, DOI:10.56338/jks.v7i6.5505
- Mohd. Yusuf, "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia." *Journal Milthree Law* Vol.1 No.2 (2024):149-180, <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.7>
- Mohammad Rizky Pratama. "Optimization of Patrol Unit Turjawali Samapta in Preventing the Criminal Act of Breaking and Entering in the Jurisdiction of Klaten Polres". *Advances in Police Science Research Journal* Vol.5 No.3 (2024):436-442, <https://doi.org/10.70526/apsrj.v5i3.794>.
- Muhammad Guliansyah Zulfikar, "Peran Patroli Roda Empat Subsatgas Samapta Dalam Mewujudkan suasana pemilu 2019 yang kondusif Di Polres Salatiga" *Indonesian Journal of Police Studies* Vol. 1 No.1 (2020):301-358, <https://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/80/47>
- Renaldi Hadi, Nova E. Mohammad, Nur Aina Ahmad, "Proses Penanganan Kasus Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Gorontalo". *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law*. Vol 1 No 2. (2024):155-172, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiccl/article/view/2323>
- Rita Novitasari Subroto, Ika Yuliana Susilawati, Irma Istihara Zain, "Eksistensi Negosiator Dalam Penanganan Unjuk rasa Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa". *Unizar Recht Journal* Vol. 2 No. 3, (2023):458-466.
- Satriya Kurnia Sanjaya, Fakhlur, "Penanganan Secara Humanis Dalam Menghapai Kegiatan Unjuk Rasa Yang Berlangsung Secara Anarkis". *Jurnal Ilmiah Publika* Vol.10 No.1 (2022):205-306, <https://ejournalugj.com/index.php/Publika/article/view/8069>
- Siska Oktariza, Al Rafni, Suryanef, Irwan Hamdi, "Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Negeri Padang sebagai saluran aspirasi politik". *Journal of Education, Cultural and Politics* Vol.4 No.1 (2024): 237-247, <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i1.403>
- Sri Nur Hari Susanto, 2020, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang

Pemerintahan”, *Administrative Law & Governance Journal*, vol.3 no.3 (2020): 430-441. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430-44>.

Sukri Badaruddin, Nabila Fani Basri, “Penanganan Unjuk Rasa Dikaji Dalam Sudut Pandang Yuridis.” *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol.1 No.2 (2020):130-145, <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i2.114>

Winarsi, S., Nugraha, X., Nathalia, A. R., & Laurentius, M. E. “Constitutional Internet Blocking: Sebuah Upaya Preemtif Terhadap Digital Authoritarian Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis”. *Jurnal Suara Hukum*, Vol.5 No.2 (2023);149-176. <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n2.p149-176>

Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti, dkk, “Penerapan Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis”. *Journal Evidence Of Law* Vol 1 No.2 (2022):1-17, <https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.43>

Skripsi

Ali Nurfado, “Peranan Satuan Samapta Dalam Melakukan Tindakan Terhadap Pelaku Minuman Keras Berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Huruf d Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor Di Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota’. 2024, Skripsi Universitas Galuh

Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. 2019.

Mundung, R. F. P. “Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Dharmas Indonesia. 2022.

Pratama, P. M. “Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012

Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Polda Bengkulu)” Skripsi Fakultas Hukum UIN FAS Bengkulu.2024

Wafi Djarojati Sanoto, “Tugas Dan Wewenang Polri Dalam Menjaga Keamanan Masyarakat Kabupaten Semarang Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2021.

Yunita Dwi Aryani, “Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilaya Hukum Polres Kudus”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 adalah peraturan Kepala Kepolisian Negara tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampain Pendapat Di Muka Umum.

Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi